

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN “PEMBOBOLAN DANA”  
OLEH PEGAWAI BANK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar  
No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**ARSIDIN**  
**NIM: 10500110025**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsidin  
NIM : 10500110025  
Tempat/Tgl. Lahir : Pongka, 21 Mei 1992  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Bumi Sudiang Raya Blok G/13  
Judul : TINDAK PIDANA PEMALSUAN “PEMBOBOLAN DANA ” OLEH PEGAWAI BANK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 September 2014

Penyusun

**ARSIDIN**  
**NIM: 10500110025**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis terhadap Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**”, yang disusun oleh Saudari Sulfiani Ika Puspita Nim : **10600106064**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 09 **September 2010 M** bertepatan dengan Dzulhijjah **1431 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 09 September 2010 M  
14 Dzulqaidah 1435 H

### **DEWAN PENGUJI :**

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A	( ..... )
Sekretaris	: Hamsir, SH., M.Hum.	( ..... )
Munaqisyi I	: Dr. H. Kasjim, S.H.,M.TH.i	( ..... )
Munaqisyi II	: Dra. Nila Sastrawati M, Si	( ..... )
Pembimbing I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	( ..... )
Pembimbing II	: Dr. Muh. Sabir, M.Ag	( ..... )

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A  
NIP. 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Tindak Pidana Pemalsuan “Pembobolan Dana” Oleh Pegawai Bank. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 2403/ Pid.B/ 2011/ PN. Mks).** Untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.

Keberhasilan penulisan skripsi ini juga merpuakan buah dari motivasi dan dukungan dari kedua orang tua Penulis, Hadi dan Simbara beserta saudaraku, Tamba tambrin, kemena, menna, kaya, hasanuddin, bunga, abdul wahab dan kakak iparku, suwarni, santi, nakkase, dan emmang yang dengan sabarnya menguatkan hati Penulis pada setiap tahapan perkembangan studi Penulis. Segala doa, harapan, dan bimbingan menjadi kekuatan tersendiri yang memberi Penulis petunjuk dalam setiap rintangan yang menghambat Penulis.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT., MS. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan fasilitas Penulis sehingga mampu menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. DR. H. Ali Parman, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III atas segala fasilitas yang telah diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H selaku ketua dan sekretaris jurusan ilmu hukum serta staf jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik

sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Rahman syamsuddin, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I dan Dr. Muh. Sabir, M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah memberikan kontribusi Ilmu dan bimbingannya kepada penulis penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat Penulis, Ali imran, Fajrin M, Hamka, Nasrullah,Argha, serta teman-teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kebersamaan kita semua selalu terpatrit dalam lubuk hati yang paling dalam.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya melengkapi skripsi ini. Sebagai akhir, semoga Allah SWT., memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Makassar, 01 September 2014

Penyusun

**ARSIDIN**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-14</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>15-41</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan .....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	16
3. Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah .....	23
4. Tindak Pidana Mayantara di Bidang Perbankan.....	26
5. Tindak Pidana di Bidang Perbankan sebagai Tindak Pidana Ekonomi .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan .....	29
1. Pidana Pokok .....	30
2. Pidana Tambahan.....	31
C. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah .....	32
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang Telah di Ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan .....	34
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42-44</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43

	E. Instrumen Penelitian .....	43
	F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data .....	43
	G. Pengujian Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45-65</b>
	A. Posisi Kasus .....	45
	B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pembobolan Dana Nasabah oleh Jaksa Penuntut Umum .....	47
	1. Dakawaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) .....	50
	2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	52
	C. Penerapan Hukum Tindak Pidana Perbankan Trhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks.....	53
	1. Amar Putusan .....	53
	2. Analisa Penulis .....	54
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66-67</b>
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Implikasi Penelitian .....	66
	<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>67</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

**Nama : Arsidin**  
**NIM : 10500110025**  
**Jurusan : Ilmu Hukum**  
**Fakultas : Syari'ah dan Hukum**  
**Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemalsuan “Pembobolan Dana” Oleh Pegawai Bank. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 2403/ Pid.B/ 2011/ PN. Mks).**

---

Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Dana. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana pembobolan dana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembobolan dana.

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini, yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan yakni mengumpulkan data secara langsung dari pengadilan negeri makassar dan wawancara langsung dengan hakim atau pejabat yang mengetahui perkara tersebut. sementara penelitian pustakan dilakukan dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber yang berhubungan dengan objek kajian penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil yang Penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu: (1) Terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah dapat diterapkan 2 (Dua) undang undang yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, . Namun, Undang Undang Perbankan harus ditempatkan sebagai prioritas jika merujuk pada asas Kekhususan yang Sistematis; (2) Penerapan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah pada perkara putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks adalah Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan dalam dakwaan kombinasi alternatif subsidair. Penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks didasarkan pada Undang Undang Perbankan dengan menjatuhkan sanksi minimal tanpa lebih jauh mempertimbangkan alasan yang dapat memperberat hukuman terdakwa. Padahal tindakan terdakwa dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang mengalami perkembangan sangat pesat. Maka dari itu untuk memudahkan penegak hukum dalam menangani tindak pidana perbankan, perlu di buat undang-undang pidana khusus perbankan.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 setelah berada di bawah penjajahan Belanda mendorong para pendiri bangsa untuk merumuskan landasan negara dengan prinsip-prinsip yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat. Indonesia kemudian ditetapkan sebagai negara hukum sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberi konsekuensi pada kehidupan masyarakat dimana hukum mengatur hampir setiap aspek dalam negara ini. Maka dari itu ditetapkanlah aturan-aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan jika terjadi pelanggaran.

Perkembangan dunia ke arah globalisasi mendorong Indonesia untuk turut menyesuaikan diri agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dihadapkan dengan berbagai perkembangan yang membutuhkan aturan hukum yang lebih akomodatif. Salah satu bidang yang terus mengalami perkembangan adalah produk jasa. Tiga hingga empat dekade sebelumnya konsumsi masyarakat hampir seluruhnya didominasi oleh produk barang. Namun, saat ini produk jasa telah mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin modern.

Salah satu produk jasa yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah jasa pelayanan keuangan dalam hal ini berbentuk perbankan. Tersedianya jasa Pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentu memberi kemudahan bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan penyedia jasa, lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengan nasabahnya. Dimana bank menjual produk jasa dan masyarakat menggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Hubungan ini yang kemudian diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Baik untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bank dan nasabah, hingga mengatur perjanjian yang timbul antar keduanya.

Aktivitas bank yang bergerak di sektor ekonomi, yang dalam hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penyimpan dana, tentulah bersentuhan dengan masyarakat luas. Oleh karena itu bank harus memiliki modal utama berupa kepercayaan, atau *trust*, untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara nasabah dan bank didasari pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan.<sup>1</sup>

Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan modal besar bagi suatu bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Hal ini

---

<sup>1</sup>Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 55.

dikarenakan, fungsi bank baru dapat terlaksana dengan seimbang jika partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbankan dilakukan dengan aktif.

Peran aktif masyarakat ini sejalan dengan fungsi bank sebagai *financial intermediary* yaitu sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Fungsi bank sebagai *financial intermediary* pada akhirnya akan sulit jika kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, terutama dalam hal menghimpun dana masyarakat. Sebaliknya, jika suatu bank memiliki kepercayaan yang besar dari masyarakat, akan lebih mudah bagi bank tersebut untuk menjalankan fungsinya. Kepercayaan terhadap bank akan mendorong masyarakat untuk menitipkan dananya kepada lembaga perbankan.

Maka dari itu, hal yang paling utama yang harus diwujudkan dari suatu bank adalah keamanan yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Prinsip kehati-hatian inilah yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap pekerja di bidang perbankan, mulai dari dewan komisaris, direksi, hingga pegawai bank.

Dalam menjalankan tugasnya, para pekerja di bidang perbankan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini sejalan dengan akses yang dimiliki bankir terhadap dana nasabah yang dititipkan ke bank. Maka dari itu, selain penerapan prinsip kehati-hatian, integritas dari bankir itu

---

<sup>2</sup>Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, h. 40.

sendiri merupakan faktor penting untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan tugas bank yang sehat. Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian serta pengawasan akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan pegawai bank yang dapat merugikan nasabah. Hal inilah yang kemudian menjadi tindak pidana ekonomi di bidang perbankan.

Banyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubungan antara bank dengan nasabah. Di satu sisi bank akan kehilangan kepercayaan dari nasabahnya, di lain sisi masyarakat kehilangan rasa aman atas lembaga perbankan.

Tindak pidana ekonomi pada saat ini disokong dengan kemajuan teknologi sehingga menghasilkan kejahatan dengan bentuk yang semakin kompleks. Kemajuan tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang justru menjadi sarana berkembangnya kejahatan terutama Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*), Kejahatan Bisnis (*Business Crime*), atau Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*).<sup>3</sup>

Salah satu kejahatan yang berkembang di bidang perbankan adalah pembobolan dana nasabah. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* sebagai tindak pidana di ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan

---

<sup>3</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h. 173.

kepada nasabah, tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang menggunakan lembaga perbankan sebagai instrumen untuk menyamarkan asal usul dana yang dihasilkan dari tindak pidana. Sedangkan pembobolan dana nasabah merugikan masyarakat secara langsung dimana dana nasabah yang dititipkan di bank menjadi berkurang dari jumlah seharusnya.

Pada dasarnya tidak terdapat definisi hukum dari tindak pidana pembobolan dana nasabah. Hal ini disebabkan oleh tindak pidana di bidang perbankan tidak diatur dalam suatu undang-undang layaknya tindak pidana khusus di bidang ekonomi. tindak pidana ini didasarkan pada perbuatan kolusif pekerja di bidang perbankan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola dana nasabah hingga mengakibatkan kerugian.

Selama bertahun-tahun, Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sebagai dasar acuan dalam tindak pidana pembobolan dana nasabah. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana ini. Pasal-pasal ini merupakan pasal dengan substansi tindakan yang dilarang berupa pemalsuan. Sebab dalam pembobolan dan nasabah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku biasanya diawali dengan tindak pidana pemalsuan. Pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembobolan dana nasabah adalah Pasal 263 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.<sup>4</sup>

Sedangkan ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut tercantum pada pasal berikutnya, yaitu Pasal 264 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Si terhukum dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan:
  - 1e. Mengenai surat autentik.
  - 2e. Mengenai surat utang atau surat tanda utang dari sesuatu surat negara atau sebagainya atau dari sesuatu balai umum.
  - 3e. Mengenai saham-saham atau surat utang atau sertifikat tanda saham atau tanda utang dari suatu perserikatan, balai atau perseroan atau maskapai.
  - 4e. Mengenai talon atau surat tanda untung (devident) atau tanda bunga uang dari salah satu yang diterangkan pada 2e. dan 3e. atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu.
  - 5e. Mengenai surat utang piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan.<sup>5</sup>
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama dipalsukan, jika pemakai surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal lain dalam KUHP yang memiliki kaitan dengan tindak pidana pembobolan dana nasabah adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan membuka rahasia dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan. Tindak pidana membuka rahasia diatur pada Pasal 322 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia

---

<sup>4</sup>Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 92.

<sup>5</sup>Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHP*, h.92

diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9000,-.

- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.<sup>6</sup>

Pasal mengenai tindak pidana membuka rahasia ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembobolan dana jika terjadi penyertaan atau *deelneming*. Hal ini disebabkan oleh dalam pembobolan dana nasabah yang dilakukan secara bersama-sama terdapat pembagian I nformasi yang seringnya bersifat rahasia mengenai nasabah. Dimana para pelaku atau salah satu pelaku memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi tersebut akibat dari suatu jabatan baik yang masih ia miliki maupun tidak. Maka, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan delik berkualifikasi yaitu delik yang mensyaratkan adanya kualitas berupa jabatan dari pelakunya.

Dalam hukum islam orang yang menggunakan jabatannya dalam memalsukan surat untuk hal yang buruk disebut juga orang munafik dan beserta penjelasan tentang hukumannya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā/4: 145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHP*, h.111.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung; Syaamil Cipta Media, 2005), h. 101.

Selain tindak pidana pemalsuan “pembobolan dana” termasuk dalam golongan orang munafik termasuk juga pencurian karena telah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk memilikinya, dan hal ini dalam hukum islam yang salah satu sumber hukum pokoknya mengacu pada Al-qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maida/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>8</sup>.

Sehubungan dengan ayat diatas, maka atas perbuatan penggelapan dana nasabah merupakan tindakan orang munafik dan selain itu tindak pidana tersebut tergolong pula sebagai perbuatan mencuri yang dilarang oleh Allah SWT, ayat tersebut sesuai dengan hukum positif maka dari itu perbuatan orang munafik dan mencuri atau membobol dana dapat dikenakan pasal kejahatan yang dilakukan dalam jabatan sesuai dengan rumusan Pasal 415 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atas surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h.144.

<sup>9</sup>Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Permata Press, 2007), h.138.



Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi perbankan membentuk sistem operasional perbankan yang semakin modern dan berbasis komputer. Tindak pidana perbankan kemudian ikut bertransformasi menjadi lebih rumit dan canggih karena dilakukan dengan bantuan teknologi. Maka dari itu, dibutuhkan aturan hukum baru baik sebagai langkah preventif maupun represif terhadap tindak pidana perbankan Indonesia. Maka dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini, tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai tindak pidana pembobolan dana nasabah mengingat undang-undang ini bukan merupakan undang-undang khusus tindak pidana perbankan. Namun, terdapat pasal dalam ketentuan pidana pada undang-undang ini yang menjadi acuan terhadap perbuatan pembobolan dana nasabah, yaitu Pasal 49 ayat (1). Rumusan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

- Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. Mengubah, mengaburkan, atau menyembunyikan, menghapuskan/menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)<sup>10</sup>.

Rumusan pasal ini telah mengalami perubahan yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak terdapat ancaman pidana penjara minimal serta jumlah denda minimal.

Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (1) di atas dapat dilihat bahwa perumus undang-undang berusaha untuk mengakomodir perkembangan tindak pidana pembobolan dana nasabah dengan tidak lagi mencantumkan kata “surat” melainkan kata “laporan” dan “dokumen”. Hal ini dikarenakan, penggunaan kata “surat” memiliki makna limitatif yaitu dokumen nyata yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun diketik dengan mesin tik. Sedangkan kata “laporan” dan “dokumen” bermakna lebih luas sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dimana pencatatan umumnya telah berupa data elektronik.

Semakin canggihnya teknologi berarti semakin canggih pula tindak pidana yang dapat timbul karenanya. Walaupun peraturan hukum terus diperbaharui untuk menyesuaikan diri, tetapi tidak dapat menghentikan timbulnya tindak pidana di masyarakat. Belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan perbankan yang dilakukan melalui dunia maya menyulitkan penegakan hukum atas

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 8.

kejahatan perbankan. Sementara itu, dunia perbankan semakin canggih dengan adanya *e-commerce* dan *internet banking*.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang “Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks)”

### ***B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus***

Dalam penelitian, peneliti mengfokuskan penelitiannya mengenai penerapan hukum pada tindak pidana pembobolan dana nasabah secara umum serta penerapan hukum pada Tindak Pidana pemalsuan “Pembobolan dana” oleh pegawai bank.

Maksudnya kesesuaian putusan pengadilan negeri makassar No. 403/Pid. B/2011/PN.Mks. yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara tindak pidana pembobolan dana nasabah.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah Penulis gambarkan di atas, maka Penulis memutuskan untuk secara spesifik membahas masalah ini secara spesifik dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah oleh jaksa penuntut umum?
2. Bagaimana analisa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana?

#### **D. Kajian Pustaka**

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Tindak Pidana pemalsuan “Pembobolan dana” oleh pegawai bank, telah ada beberapa literature yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada literature yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. agar nantinya pembahasan ini lebih focus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literature yang masih berkaitan dengan pembahasa yang di maksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul ”*Tindak Pidana di Bidang Perbankan*” juga membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Tindak Pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan* (Bandung; Alumni, 2005), h. 29-30.

2. Andi Hamzah, dalam bukunya “*Hukum Pidana Ekonomi*” menjelaskan bahwa Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Tindak pidana ini diatur pada Pasal 46 undang-undang perbankan, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.<sup>12</sup>

3. Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, dalam bukunya “*Hukum Perbankan*” menjelaskan bahwa Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Ada ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap rahasia bank, yaitu:

- a. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal;
- b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif; dan
- c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta; Erlanga, 1973), h. 55.

<sup>13</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h 510-511.

4. Hermansyah dalam bukunya "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*". membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam likuiditas bank dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung;
- a. Perlindungan hukum secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kerugian usaha yang dilakukan oleh bank.
  - b. Perlindungan hukum secara langsung/perlindungan eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. sehingga apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana diatur dalam keputusan presiden RI.No.26. Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.<sup>14</sup>

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah oleh jaksa penuntut umum.

---

<sup>14</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 23.

2. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dalam hal penerapan hukum terhadap kasus tersebut.

Manfaat yang Penulis harapkan dapat tercapai melalui peneiitian ini antara lain:

- a. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah pada lembaga-lembaga terkait khususnya aparat penegak hukum Republik Indonesia dalam menegakkan hukum nasional. Juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan baik bagi para pelaku usaha perbankan maupun para pengguna jasa perbankan mengenai aturan hukum pidana di bidang perbankan. Bagi masyarakat luas, diharapkan tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai perbankan sehingga dapat menambah kewaspadaan masyarakat akan tindak pidana di bidang ini.
- b. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai tindak pidana di bidang perbankan baik itu bagi akademisi maupun bagi praktisi di bidang hukum tanpa menutup kemungkinan bagi pihak manapun yang memiliki ketertarikan di bidang ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi hukum pidana Indonesia yaitu pidana ekonomi khususnya di bidang perbankan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbankan***

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan**

Di antara praktisi maupun akademisi hukum terdapat keberagaman penggunaan istilah dalam menyebutkan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Istilah-istilah tersebut antara lain “kejahatan di bidang perbankan”, “kejahatan perbankan”, “kejahatan terhadap perbankan”, dan tindak pidana perbankan.

Perbedaan istilah tersebut merujuk pada posisi bank dalam tindak pidana tersebut. Bank sebagai pelaku kejahatan, bank sebagai korban kejahatan, ataukah bank sebagai pelaku dan sebagai korban. Kejahatan perbankan biasa diartikan sebagai tindak pidana “di bidang perbankan” yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Dalam pengertian ini pula tercakup bank sebagai pelaku dan bank sebagai korban.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan secara khusus mengenai definisi tindak pidana perbankan. Undang-undang tersebut hanya mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang perbankan sebagai tindak pidana pelanggaran atau kejahatan.

---

<sup>15</sup>Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. . 139.



Moch. Anwar dalam bukunya “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan” merumuskan tindak pidana perbankan sebagai segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.<sup>16</sup>

Penafsiran secara harafiah dapat digunakan untuk mendefinisikan masing-masing istilah. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan. Istilah kejahatan di bidang perbankan memiliki pengertian yang sangat luas. Sedangkan, kejahatan perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) dapat memiliki arti tindak pidana yang dilakukan oleh bank.

Sesuai dengan pengertian tiap-tiap istilah di atas, maka Penulis memutuskan untuk kemudian menggunakan istilah tindak pidana di bidang perbankan dalam tulisan ini. Hal ini Penulis lakukan dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan arti yang lebih luas dari pengertian lainnya.

---

<sup>16</sup>Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, h. 139.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan, terdapat tiga belas bentuk tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup perbankan. Tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 46 sampai Pasal 50A dalam Bab Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif undang-undang tersebut. Dari ketiga belas tindak pidana tersebut, dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Tindak pidana ini diatur pada

Pasal 46 undang-undang perbankan, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya<sup>17</sup>.

Pada pasal ini, sebagaimana tercantum pada ayat (2) ancaman pidana dijatuhkan kepada korporasi dimana penuntutannya dilakukan kepada yang memberi perintah dan/atau pemimpin korporasi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.7.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang memperluas subjek hukum pidana. Pada Pasal 15 ayat 1 UUTPE dinyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dapat dijatuhkan, baik terhadap badan hukum dan lain-lain itu maupun terhadap mereka yang memberi perintah<sup>18</sup>

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Ada ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap rahasia bank, yaitu:
  - a. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal;
  - b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif; dan
  - c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.<sup>19</sup>

Tindak pidana ini diatur pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47A.

Rumusan Pasal 47 adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan

---

<sup>18</sup>A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta:Erlangga, 1973), h. 47.

<sup>19</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 519.

menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)<sup>20</sup>.

Keterangan yang dimaksud pada pasal di atas yang terdapat pada Pasal 41 adalah untuk kepentingan perpajakan. Sedangkan Pasal 41A adalah untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Pasal 42 untuk penyelesaian perkara pidana. Sedangkan Pasal 47A dirumuskan sebagai berikut:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)<sup>21</sup>.

Pasal 47A ini berisi pengecualian atas ketentuan rahasia bank. Dalam kaitannya dengan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank ini, membawa konsekuensi kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta.<sup>22</sup>

## 2. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank.

Tindak pidana ini diatur pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Perbankan yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 8.

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, h. 8.

<sup>22</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 521.

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)<sup>23</sup>.

Keterangan yang dimaksud pasal ini terdapat pada Pasal 30 adalah keterangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yang wajib diserahkan kepada Bank Indonesia. Sedangkan keterangan yang dimaksud terdapat pada Pasal 34 adalah laporan keuangan berupa neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan serta laporan berkala lainnya yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

3. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 50 dan 50A. Pada tindak pidana ini, bank menjadi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan baik internal maupun eksternal bank tersebut. Rumusan dari Pasal 49 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

---

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 8.

- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, atau menyembunyikan, menghapuskan/menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- 2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Pasal 50 merupakan pasal yang ancamannya ditujukan kepada unsur eksternal bank sesuai dengan rumusan pasal ini yang diawali dengan kata “pihak terafiliasi”. Berikut adalah rumusan dari Pasal 50:

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling

lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A menetapkan pemegang saham sebagai pihak yang dapat dipidana melalui pasal ini jika melakukan:

- Dengan sengaja menyuruh intern bank, yakni dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank;
- Untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan;
- Sehingga mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang ini serta ketentuan undang-undang lainnya yang berlaku bagi bank.<sup>24</sup>

Berikut adalah rumusan Pasal 50 A:

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Chainur Arrasjid tidak memasukkan tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan sebagai kelompok tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan. Ia hanya mengelompokkan tindak pidana dalam undang-undang perbankan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

---

<sup>24</sup>Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 56.

- Jenis dan usaha bank;
- Pembinaan dan pengawasan bank; dan
- Rahasia bank.

Selain pembagian tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Perbankan juga telah membagi tindak pidana tersebut menjadi dua, yaitu:

1. Tindak Pidana Kejahatan, merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.
2. Tindak Pidana Pelanggaran, merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2).

Penetapan kedua bentuk tindak pidana ini terhadap tindak pidana di bidang perbankan berkonsekuensi terhadap pemidanaan atas pelaku tindak pidana tersebut nantinya. Pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (2) diancam dengan hukuman kurungan dan/atau denda. Sedangkan pelanggaran terhadap pasal-pasal lain yang digolongkan sebagai kejahatan diganjar dengan hukuman penjara dan denda.

Terdapat perdebatan mengenai tindak pidana yang terdapat pada undang-undang perbankan. Terdapat anggapan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana umum, mengingat undang-undang perbankan tidak mengatur proses peradilan khusus terhadap tindak pidana perbankan. Pendapat lain menyatakan bahwa tindak pidana yang terdapat pada undang undang perbankan sebagai tindak pidana khusus. Pernyataan tersebut didasari pada aturan tindak pidana perbankan yang



terdapat di luar KUHP serta ancaman pidana yang berat dengan kumulatif dengan memberikan batasan minimal.

Jika mengacu pada Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Hal ini berdasar pada penjelasan dari pasal 284 KUHP yang menetapkan ketentuan khusus acara pidana.

### **3. Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah**

Tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) undang-undang perbankan. Walaupun baik pada pasal tersebut maupun pada ketentuan umum dari undang-undang perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit nama dari tindak pidana ini, tetapi penggunaan frasa “pembobolan dana nasabah” telah bersifat umum. Dalam kejahatan perbankan, kasus-kasus pembobolan bank pelakunya biasanya orang-orang yang mempunyai kedudukan dan status sosialnya yang tinggi, pelakunya dikenal dengan sebutan *white collar criminal*.<sup>25</sup>

Ayat (1) Pasal 49, yang mendapatkan ancaman hukuman adalah dari intern bank sendiri, yakni anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

---

<sup>25</sup>Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 143.

- Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;
- Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan;
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan<sup>26</sup>.

Dalam dunia perbankan internasional tindakan pembobolan dana nasabah ini tergolong *bank fraud*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *bank fraud* dapat didefinisikan sebagai:

*The criminal offense of knowingly executing, or attempting to execute, a scheme or artifice to defraud a financial institution, or to obtain property owned by or under the control of a financial institution, by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises.*<sup>27</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, definisi hukum dari *bank fraud* adalah tindak pidana dengan sengaja mengeksekusi atau mencoba untuk melaksanakan skema atau muslihat untuk menipu lembaga keuangan atau untuk mendapatkan properti yang dimiliki atau di bawah kendali lembaga keuangan dengan menggunakan identitas palsu, representasi, atau janji.

Berdasarkan pada definisi ini dapat dilihat bahwa pada tindak pidana *bank fraud*, bank berada pada posisi korban yang dalam hal ini turut merugikan nasabah jika tindak pidana tersebut berupa pembobolan dana nasabah.

---

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 8.

<sup>27</sup>[www.fraudauditing.net](http://www.fraudauditing.net), Dikutip dari artikel: *Fraud Definitions*, Diakses pada tanggal 16 agustus 2014 pukul 12.53 WITA.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh unsur intern bank itu sendiri (anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank) maka tindak pidana ini merupakan kejahatan “orang dalam”. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam, pelaku juga dapat dijerat dengan aturan lain diluar undang-undang perbankan, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), Pasal 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dll.
2. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU no. Tahun 2002. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah UU ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian Negara.

Namun, dalam praktik peradilan pidana, penggunaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam tindak pidana perbankan khususnya pembobolan dana nasabah masih mengundang perdebatan. Dalam beberapa kasus, Undang-Undang Tipikor mendapat tempat yang lebih utama dibandingkan Undang-Undang Perbankan dalam penuntutan kasus perbankan. Beberapa ahli hukum menganggap hal ini sebagai penyimpangan terhadap asas *systematische specialiteit* atau asas kekhususan yang sistematis.

Asas ini merupakan ketentuan pidana yang menyatakan walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Tindakan memprioritaskan penuntutan menggunakan Undang-Undang Tipikor dianggap mendelegitimasi Undang-Undang Perbankan yang pada dasarnya telah disusun untuk menanggulangi tindak pidana di sektor perbankan.

#### **4. Tindak Pidana Mayantara di Bidang Perbankan**

Tindak pidana mayantara atau *cyber crime/computer crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai computer sebagai sarana/alat atau computer sebagai obyek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Tindak pidana computer atau *cyber crime* adalah perbuatan illegal yang dilakukan dengan menggunakan computer. Ini merupakan pelanggaran hukum pidana dengan menggunakan teknologi digital atau elektronik untuk kegiatan atau transaksi yang tidak sah termasuk akses kepada sistem teknologi informasi sebagian atau seluruhnya. Dalam sektor perbankan, itu dapat berarti manipulasi sistem perbankan untuk melakukan pencurian identitas secara tidak sah terkait dengan ATM.

*Cybercrime e-banking* atau kejahatan internet sektor perbankan merupakan tindak pidana yang disebabkan karena adanya transaksi perbankan yang dilakukan melalui media internet berupa *e-commerce* atau transaksi elektronik dalam layanan bernama *internet banking* atau *e-banking*. Melalui sarana ini seorang nasabah dapat melakukan pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, pembelian voucher pulsa, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan (seperti listrik, telepon, dsb.) melalui internet.<sup>28</sup>

Bentuk tindak pidana perbankan di dunia maya yang berhubungan dengan pembobolan dana nasabah adalah *Brute Force Attacking*. Tindakan ini merupakan usaha untuk mendapatkan *password* atau *key* dengan mencoba semua kombinasi yang mungkin dengan mencoba kombinasi data pribadi nasabah.<sup>29</sup> Sedangkan berdasarkan modus operandi *cybercrime*, tindak pidana pembobolan dana nasabah digolongkan sebagai *infringements of privacy*. *Infringements of privacy* merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara terkomputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan baik secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, pin ATM, dll.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup><http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/blog/2241308-resume-cybercrime/>, Dikutip dari artikel: *Resume Cyber Crime (E-Banking dan E-Commerce)*, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2014 pukul 12.39 WITA.

<sup>29</sup><http://cewekkarir.wordpress.com/my-task/cybercrime-dunia-perbankan/>, Dikutip dari artikel: *Cybercrime Dunia Perbankan*, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2014 pukul 12.29 WITA.

<sup>30</sup><http://nanangchairudin.com/2010/12/05/makalah-cybercrime/>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2014 pukul 12.41 WITA.

Menurut hukum positif Indonesia, tindak pidana pembobolan nasabah selain dapat dijerat dengan undang-undang perbankan juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada UUIITE tersebut terdapat Pasal yang dapat dikenakan terhadap perbuatan pembobolan dana nasabah yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas *internet banking*. Pasal tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik<sup>31</sup>.

Sedangkan ancaman pidana terhadap pasal ini terdapat pada Pasal 48 ayat (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)<sup>32</sup>.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang *e-commerce* dan *e-banking* yaitu EFTA atau *Electronic Funds Trasfer Act*. Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana pada ruang lingkup transaksi dana elektronik berupa tindak pidana yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan penyalahgunaan kartu akses yang hilang dan dipalsukan.

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik* (Surabaya: Kesindo Utama, 2008), h.8.

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik*, h. 10-11.

## **5. Tindak Pidana di Bidang Perbankan sebagai Tindak Pidana Ekonomi**

Tindak pidana ekonomi (TPE) dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi. Dalam arti luas, TPE didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar UU darurat no 7 tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Definisi lain dari tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

Berdasarkan definisi tindak pidana ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan merupakan tindak pidana ekonomi. Hal ini juga dapat didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana ekonomi menurut Conklin, yaitu:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;
2. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan;
3. Tujuannya memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang/menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 171.

Tipe tindak pidana ekonomi menurut *Ensiklopedi Crime and Justice* dibedakan dalam tiga tipe tindak pidana ekonomi, yaitu

- *Property Crimes*;
- *Regulatory Crimes*; dan
- *Tax Crimes*.<sup>34</sup>

Jika melihat tiga tipe di atas, maka tindak pidana di bidang perbankan khususnya pembobolan dana nasabah dapat diklasifikasikan sebagai *property crimes*. Hal ini didasarkan pada tipe tindak pidana ekonomi ini yang merupakan kejahatan terhadap objek yang dikuasai oleh individu maupun yang dikuasai oleh negara.

Sedangkan *regulatory crime* merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standardisasi dalam dunia usaha. *Tax crimes* sendiri merupakan tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang undang pajak.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pidanaan**

Pengenaan pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran perbankan umumnya mengacu ke Pasal 10 KUHP:

---

<sup>34</sup>Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 50.



1. Pidana pokok dan pidana tambahan (penjara, kurungan denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim);
2. Sanksi administratif oleh Bank Indonesia: denda, teguran, penurunan tingkat kesehatan, larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha (sanksi administratif tidak mengurangi ketentuan ancaman pidana).<sup>35</sup>

### **1. Pidana Pokok**

Mengenai pidana pokok diatur dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara, yang terdiri atas:
  - 1) Penjara seumur hidup; dan
  - 2) Penjara sementara waktu.
- a. Pidana Kurungan
- b. Pidana Denda

Pidana pokok yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain:

1. Pidana penjara sementara waktu;
2. Pidana Kurungan; dan
3. Pidana denda.

---

<sup>35</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 172.

Berikut adalah tabel pidana pokok yang terdapat dalam undang-undang perbankan dalam urutan pasal per pasal yaitu:

a. Tindak pidana kejahatan

Pasal	Pidana Pokok			
	Penjara		Denda	
	Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal
46 ayat (1)	5 tahun	15 tahun	10 miliar	200 miliar
47 ayat (1)	2 tahun	4 tahun	10 miliar	200 miliar
47 ayat (2)	2 tahun	4 tahun	4 miliar	8 miliar
47 A	2 tahun	7 tahun	4 miliar	15 miliar
48 ayat (1)	2 tahun	10 tahun	5 miliar	100 miliar
49 ayat (1)	5 tahun	15 tahun	10 miliar	200 miliar
49 ayat (2)	3 tahun	8 tahun	5 miliar	100 miliar
50	3 tahun	8 tahun	5 miliar	100 miliar
50 A	7 tahun	15 tahun	10 miliar	200 miliar

b. Tindak pidana pelanggaran

Pasal	Pidana Pokok			
	Kurungan		Denda	
	Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal
48 ayat (2)	1 Tahun	2 Tahun	1 Miliar	2 Miliar

## **2. Pidana Tambahan**

Menurut Pasal 10 huruf b KUHP, pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut Pasal 35 KUHP terdiri dari:
  1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. Hak memasuki Tentara Nasional Indonesia;
  3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
  5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
  6. Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

### ***C. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah***

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana administratif. Tindak pidana administratif merupakan tindak pidana yang timbul melalui undang-undang yang bersifat administratif. Berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus, tindak pidana administratif timbul dari prefensi terhadap

pelanggaran ketentuan yang diatur dalam suatu undang undang yang sifatnya administratif. Larangan pada undang undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi administratif, tetapi pada beberapa undang undang juga terdapat pasal-pasal dengan ancaman sanksi pidana.

Sebagai sebuah undang undang administratif, Undang Undang Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam praktik peradilan pidana. Terdapat beberapa undang undang lain yang sering digunakan untuk mendakwa tersangka kasus perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi yang dapat ditelaah secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tidak pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana (*concursum*).

Dalam proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan melalui persidangan. Menurut Yahya Harahap,<sup>36</sup> dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan adalah perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan tersangka. Walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan dalam perumusan surat dakwan, tapi keleluasaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

---

<sup>36</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 387.

Surat dakwaan merupakan objek penting dalam penerapan hukum atas suatu kasus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk memeriksa terdakwa dalam sidang pengadilan. Maka dari itu, penetapan aturan hukum yang akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang kemudian akan Penulis kemukakan merupakan ulasan mengenai undang undang yang dapat digunakan dalam mendakwa pelaku tindak pidana pembobolan dana nasabah. Undang undang tersebut antara lain:

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Kedua Undang-Undang di atas merupakan aturan-aturan hukum yang kerap digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan berupa pembobolan dana nasabah. Dalam beberapa kasus pembobolan dana nasabah, Jaksa Penuntut Umum seringkali menyusun surat dakwaan dengan mengkombinasikan ketiga undang undang tersebut diatas.

**1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Undang undang ini merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum Indonesia khususnya sektor perbankan. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern, perkembangan tindak pidana di sektor perbankan juga mengalami transformasi. Sayang sekali hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki undang undang pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Maka dari itu, Undang Undang Perbankan yang merupakan undang undang yang bersifat administratif ini masih menjadi pilihan utama dalam mendakwa pelaku tindak pidana pembobolan dana nasabah.

Tindak pidana pembobolan dana nasabah lazimnya mengacu pada tindak pidana yang mencocoki rumusan Pasal 49 baik ayat (1) maupun ayat (2) Undang Undang Perbankan. Sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perbankan, Pasal 49 ayat (1) dan (2) termasuk ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Karakteristik dari jenis tindak pidana ini adalah adanya kerugian yang timbul pada pihak bank akibat perbuatan internal maupun eksternal bank. Berikut adalah rumusan dari Pasal 49 ayat (1) dan (2):

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. Mengubah, mengaburkan, atau menyembunyikan, menghapuskan/ menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,

mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)<sup>37</sup>

Sebagai undang undang yang khusus membahas mengenai peraturan di

bidang perbankan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan instrumen hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus pembobolan dana nasabah. Walaupun undang undang ini bukan merupakan undang undang tindak pidana khusus, namun ketentuan pidana yang terdapat pada undang undang ini memiliki kekuatan yang sama dengan ketentuan hukum pidana lainnya. Terlebih lagi Pasal 49 ayat (1) dan (2)

---

<sup>37</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 80.

merupakan tindak pidana kejahatan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang undang ini.<sup>38</sup>

Penggunaan Undang Undang Perbankan sering kali dikesampingkan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku pembobolan dana nasabah. Dalam praktiknya masih banyak dakwaan terhadap pelaku pembobolan dana nasabah yang menempatkan Undang Undang Perbankan dibawah Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus-kasus tertentu pembobolan dana nasabah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya kemiripan antara tindak pidana pembobolan dana nasabah dengan tindak pidana korupsi dimana keduanya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas atau jabatan tertentu.

Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal asas *Systemstische Specialiteit* yang dapat diartikan sebagai asas Kekhususan yang Sistematis. Asas Kekhususan yang Sistematis ini merupakan asas turunan dari asas *Lex Specialis Derogat Lege Generalis* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum). Pada umumnya asas *Lex Specialis* hanya dianggap sebagai asas yang mengatur pemberlakuan aturan hukum yang dikenakan pada suatu kasus jika terdapat dua aturan dimana salah satunya bersifat lebih khusus dari yang lain. Namun, jika terdapat dua aturan yang dapat diberlakukan tetapi keduanya merupakan aturan khusus, maka

---

<sup>38</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 164.



aparatus hukum harus berpegang pada turunan dari asas *Lex Specialis* yaitu asas Kekhususan yang Sistematis.

Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan yang Sistematis berarti dalam memilih antara dua aturan yang akan diberlakukan, harus digunakan pengamatan yang sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan terjadinya delik berada dalam konteks perbankan, maka undang-undang khusus yang harus diberlakukan atau diprioritaskan adalah Undang-Undang Perbankan meskipun terdapat undang-undang khusus lain yang memiliki ketentuan yang juga dapat mencakup perbuatan tersebut.

Penggunaan Undang-Undang Perbankan dalam tindak pidana pembobolan dana nasabah tersebut sesuai dengan hasil wawancara Penulis pada tanggal 19 Agustus 2014 Pukul 10.23 WITA dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Jamuka Sitorus, selaku Ketua Majelis dalam Kasus Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks yang mengatakan bahwa jika terjadi perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan hukum yang sifatnya khusus, maka penegak hukum harus taat terhadap asas Kekhususan yang Sistematis. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana pembobolan dana nasabah yang merupakan bagian dari tindak pidana perbankan, maka aturan yang sebaiknya digunakan adalah Undang-Undang

Perbankan. Hal ini mengingat bahwa Undang Undang Perbankan merupakan undang undang yang khusus dibuat untuk diberlakukan pada ruang lingkup perbankan baik yang sifatnya administratif maupun yang bersifat pidana.

## **2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Tujuan perumusan undang undang ini, sesuai dengan yang tercantum pada Bab II Asas dan Tujuan Pasal 4 huruf e, adalah:

Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi<sup>39</sup>.

Sebagai salah satu sektor yang menggunakan dan menyelenggarakan teknologi informasi berupa *electronic banking* atau *internet banking*, perbankan juga menjadi objek yang diatur oleh undang undang ini. Perbankan menjadi salah badan strategis yang disebutkan oleh undang undang ini, yaitu pada Pasal 52 ayat (3). Berikut adalah rumusan Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap computer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan,

---

<sup>39</sup>Republik Indonesia, *undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik* (Surabaya: Kesindo Utama, 2008), h. 2.

diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga<sup>40</sup>.

Menurut pasal tersebut, jika pelanggaran terhadap undang undang ini dilakukan pada ruang lingkup perbankan, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lebih berat daripada jika tindak pidana tersebut dilakukan di sektor non pemerintah dan bukan badan strategis.

Tindak pidana yang diatur oleh undang undang ini terdapat pada Bab VII, Perbuatan yang Dilarang. Pada Bab Perbuatan yang Dilarang terdapat sebelas pasal yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut undang undang ini. Di antara kesebelas pasal tersebut, terdapat pasal yang dapat digunakan untuk mendakwa pelaku tindak pidana pembobolan dana nasabah, yaitu Pasal 32. Berikut adalah rumusan dari pasal tersebut:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup>Republik Indonesia, *undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik*, h.11.

<sup>41</sup>Republik Indonesia, *undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik*, h.8.

Tindak pidana yang diatur pada pasal ini terbagi atas 2, yaitu delik formil dan delik materiil. Ayat (1) dan (2) merupakan delik formil, dimana pada kedua ayat tersebut yang dilarang adalah perbuatannya, sedangkan ayat (3) memberi syarat adanya akibat atas perbuatan yang dilarang pada ayat (1).

Ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang pada Pasal 32 terdapat pada Pasal 48 Bab XI Ketentuan Pidana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut rumusan dari Pasal 48:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)<sup>42</sup>.

Pemilihan pasal pada Undang Undang ITE untuk digunakan dalam dakwaan atas tindak pidana pembobolan dana nasabah didasarkan pada modus operandi dari tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana pembobolan dana nasabah, pelaku sering kali membobol dana nasabah dengan melakukan perubahan terhadap data nasabah. Mengingat saat ini hampir seluruh pencatatan pada sistem perbankan menggunakan bantuan teknologi, maka data nasabah yang kemudian dimiliki oleh bank merupakan data elektronik. Adanya perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan data elektronik

---

<sup>42</sup>Republik Indonesia, *undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik*, h.10.

nasabah dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Walaupun Pasal 32 tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa data elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi adalah data nasabah, tetapi pasal ini Penulis anggap memiliki kekuatan yang sama dengan undang undang perbankan dalam mengadili tindak pidana pembobolan dana nasabah. Adanya Pasal 52 ayat (3), yang memberi penegasan bahwa jika tindak pidana dalam undang undang ini dilakukan pada badan strategi salah satunya perbankan maka ancaman pidananya akan lebih berat, menandakan bahwa pasal-pasal pada undang undang ini juga dibuat dengan tujuan untuk digunakan dalam mengadili pelaku tindak pidana perbankan.

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang undang yang dianggap dapat menutupi kekosongan hukum pada hukum pidana perbankan. Dimana sampai pada saat ini belum terdapat undang undang khusus baik yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada ruang lingkup perbankan maupun yang mengatur tentang transaksi dana elektronik atau *electronic funds transfer*. Kekosongan aturan hukum ini dihadapkan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan melalui dunia maya berkembang dengan pesat. Dengan adanya pasal transaksi elektronik di undang undang, walaupun tidak secara khusus ditujukan untuk transaksi elektronik atas dana nasabah, hingga hari ini dianggap masih cukup akomodatif untuk dikenakan pada tindak pidana pembobolan dana nasabah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa institusi penegak hukum tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemalsuan surat “pembobolan dana nasabah” di Bidang Perbankan.

Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

##### ***C. Sumber Data***

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber sebagai sumber informasi yang telah memiliki pengalaman dalam penegakan hukum untuk mengetahui tanggapan, pendapat, pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan dengan tindak pidana pembobolan dana nasabah.
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pencatatan dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan alat rekam suara selama wawancara dengan hakim maupun pihak yang terkait mengenai judul yang penulis angkat dalam skripsi ini

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Makassar untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang - undangan dan uraian umum.
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat , terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang - undangan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Posisi Kasus***

Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti-bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E. bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan desember tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar telah melakukan dan turut serta, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar bagian kasir, tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke sistem untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user id dengan nomor 7559 dan mencatat data-data nasabah yang diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu ATM, dan saldo nasabah.

Perbuatan terdakwa terungkap setelah salah satu nasabah yakni H. Ibrahim Bonro, S.H., M.H. komplain dananya berkurang dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening H. Ibrahim Bonro dilakukan oleh Rully, S.E. bersama terdakwa Rudi Guiwan yang telah lebih dulu menginformasikan kepada Rully, S.E. nomor pin ATM H. Ibrahim Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari H. Ibrahim Bonro yaitu Ir. Abd. Hafid.

Nomor pin ATM tersebut diketahui terdakwa setelah Ir. Abd. Hafid gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang Kakatua, sehingga terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang bertugas sebagai kasir langsung membantu. Tanpa sadar Ir. Abd Hafid menyebutkan nomor pin dari kartu ATM milik ayahnya yakni 101010 yang kemudian terus diingat oleh terdakwa Rudy Guiwan.

Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM nasabah tersebut kepada Rully S.E. yang bekerja sebagai *customer service* pada Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy Guiwan bersama Rully lalu melakukan registrasi sebagai pengguna CIMB CLIKS melalui situs [www.Cimbcliiks.co.id](http://www.Cimbcliiks.co.id) dengan menyewa sebuah unit computer pada warung internet. Setelah melakukan registrasi Rully lalu menghubungi Rabiah Aladawiyah pada bagian *customer service* dengan mengaku sebagai H. Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi nomor 08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully melakukan

pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampung yang dibuat oleh saudara Alwi yang berada di Jakarta.

Jumlah dana yang berhasil dipindahbukukn oleh Rully, S.E. dari rekening atas nama H. Ibrahim Bonro adalah sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak lima kali sehingga totalnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;
- Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;
- Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di bank CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak lima kali hingga totalnya sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2010;
- Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmudddin Yasin di Bank Mandiri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2010.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, Bank CIMB Niaga harus mengganti kerugian nasabah sehingga menderita kerugian sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan terdakwa sendiri berdasarkan perbuatannya tersebut memperoleh bagian sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

***B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah oleh Jaksa Penuntut Umum***

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Perbankan merupakan tindak pidana administratif. Tindak pidana administratif merupakan tindak pidana yang timbul melalui undang undang yang bersifat administratif. Berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam undang undang pidana khusus, tindak pidana administratif timbul dari prefensi terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam suatu undang undang yang sifatnya administratif. Larangan pada undang undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi administratif, tetapi pada beberapa undang undang juga terdapat pasal-pasal dengan ancaman sanksi pidana. Sebagai sebuah undang undang administratif, Undang Undang Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam praktik peradilan pidana. Terdapat beberapa undang undang lain yang sering digunakan untuk mendakwa tersangka kasus perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi yang dapat ditelaah secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tindak pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-

tahapan yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana (*concursum*).

Dalam proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan melalui persidangan. Menurut Yahya Harahap,<sup>43</sup> dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan adalah perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan tersangka. Walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan dalam perumusan surat dakwaan, tapi keleluasaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Surat dakwaan merupakan objek penting dalam penerapan hukum atas suatu kasus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk memeriksa terdakwa dalam sidang pengadilan. Maka dari itu, penetapan aturan hukum yang akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang kemudian akan Penulis kemukakan merupakan ulasan mengenai undang undang yang dapat

---

<sup>43</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 387.

digunakan dalam mendakwa pelaku tindak pidana pembobolan dana nasabah. Undang undang tersebut antara lain:

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Kedua Undang Undang di atas merupakan aturan-aturan hukum yang kerap digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan berupa pembobolan dana nasabah. Dalam beberapa kasus pembobolan dana nasabah, Jaksa Penuntut Umum seringkali menyusun surat dakwaan dengan mengkombinasikan kedua undang undang tersebut diatas.

### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini merupakan surat dakwaan kombinasi. Bentuk surat dakwaan kombinasi merupakan gabungan antara bentuk surat dakwaan kumulatif, alternatif, dan subsidair. Untuk surat dakwaan pada kasus ini, kombinasi yang diterapkan antara bentuk alternatif dengan subsidair. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan kombinasi ini timbul akibat adanya perkembangan variasi tindak pidana atau kriminalitas baik dalam jenis/bentuknya maupun dalam modus operandinya.

Berikut adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa

Rusy Guiwan bin Yusran Guiwan:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Perbuatan Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

**Primair**

Bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Perbuatan terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Subsida**

Bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik, dan dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.

Perbuatan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Atau Ketiga**

Bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan bersekutu.

Perbuatan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



### **1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rudy Guiwan bin

Yusran Guiwan, pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersalah melakukan tindak pidana pembobolan dana nasabah Bank CIMB Niaga sebagaimana diatur dan diancam pasal 49 ayat (1) c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal;
  2. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) unit komputer merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keyboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda terima tanggal 20-01-2011;
  3. 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank CIMB Niaga;
  4. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada Bank CIMB Niaga;
  5. Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty;
  6. Berita acara serah terima *user id* Rudy Guiwan;
  7. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga,
  8. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan keluhan a.n. Lily Herawaty

9. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, Semarang untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB Niaga Cab. Makassar.
4. Menetapkan agar ia terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

***C. Penerapan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks***

**1. Amar Putusan**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan dalam amar putusannya pada Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembobolan dana nasabah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal;
  2. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) unit komputer merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan

- 1 (satu) buah keryboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda terima tanggal 20-01-2011;
3. 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank CIMB Niaga;
4. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada Bank CIMB Niaga;
5. Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty;
6. Berita acara serah terima *user id* Rudy Guiwan;
7. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga,
8. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan keluhan a.n. Lily Herawaty
9. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, Semarang untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB Niaga Cab. Makassar;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);  
Demikianlah yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011.

## 2. Analisis Penulis

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal atau aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa perbuat dilakukan oleh pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Proses hukum lalu berlanjut dengan upaya pembuktian untuk mengetahui peraturan apa saja yang telah dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar perturan

tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku.

Kasus yang Penulis uraikan di atas merupakan kasus pembobolan dana nasabah yang diduga dilakukan oleh Rudi Guiwan terhadap nasabah bank tempat ia bekerja, yaitu Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 hingga 2011. Akibat perbuatan tersebut, nasabah Bank CIMB Niaga bernama H. Ibrahim Bonro mengalami kerugian sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kekurangan dana nasabah tersebut lalu diganti oleh Bank CIMB Niaga yang pada akhirnya menanggung kerugian atas penggantian tersebut.

Perbuatan pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Rudi Guiwan dilakukan secara bersama-sama dengan pegawai Bank CIMB Niaga lainnya, yaitu Rully. Namun dalam penuntutannya, perkara kedua pelaku tersebut diproses secara terpisah dalam dua berkas perkara berbeda. Penuntutan secara “pemecahan” atau *splitsing* adalah hal yang lazim dilakukan dalam penuntutan perkara yang terdapat lebih dari satu terdakwa atau penyertaan (*deelneming*). Menurut Adami Chazawi, *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>44</sup>

Menurut Ketua Majelis yang mengadili perkara Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks, Jamuka Sitorus, dalam wawancara yang Penulis lakukan

---

<sup>44</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 73.

pada tanggal 19 Agustus 2014 Pukul 10.23 WITA, pemecahan atau *splitsing* berkas perkara pada perkara tindak pidana pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Rudi Guiwan dan Rully dimaksudkan untuk memudahkan proses pembuktian. Hal ini dimaksudkan agar kedua terdakwa dapat saling bersaksi pada sidang satu sama lain sehingga dapat membantu proses pembuktian di pengadilan. Mengenai pemecahan berkas perkara ini diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.<sup>45</sup> Salah satu yang menjadi tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan menjadi dasar landasan pemeriksaan kasus tersebut pada proses peradilan. Maka dari itu, surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yang harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 385.

<sup>46</sup>PAF Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), h. 315.

Pemilihan bentuk surat dakwaan harus dilakukan dengan berpedoman pada hasil penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jika terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka dapat digunakan dakwaan biasa atau tunggal. Jika terdakwa melakukan tindak pidana yang menyentuh lebih dari satu rumusan tindak pidana pada undang undang dan belum dapat dipastikan ketentuan mana yang telah dilanggar, maka jaksa dapat menyusun surat dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang tiap-tiap tindak pidana tersebut berdiri sendiri, maka dapat digunakan jenis dakwaan kumulatif.

Pada kasus yang Penulis teliti, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan bentuk kombinasi. Kombinasi yang dipilih adalah gabungan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan surat dakwaan subsidair. Hal ini ditandai dengan adanya kata “atau” diantara setiap dakwaan. Berikut adalah susunan dakwaan kombinasi yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum:

– Pertama

Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

– Kedua

Primair :Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar :Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo.

Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1)  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

– Ketiga

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang diartikan sebagai dakwaan yang antar satu dakwaan dengan yang lainnya saling mengecualikan atau *one that substitutes for other*.<sup>47</sup> Bentuk surat dakwaan ini sering kali digunakan jika tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menyentuh dua atau lebih peraturan pidana yang memiliki corak yang sama atau kemiripan akan tetapi tidak sampai berupa perbarengan atau *concurus*.

Pada kasus yang Penulis teliti, perbuatan terdakwa Rudi Guinwan membobol dana nasabah memiliki kemiripan dengan tindak pidana yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE serta Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan bersama-sama. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang bermaksud untuk menghindari terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana (*crime liability*).

---

<sup>47</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 399.

Surat dakwaan alternatif selain memiliki karakteristik saling mengecualikan, juga berfungsi memberikan pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pada dakwaan ini, hakim memiliki alternatif dakwaan yang dapat menjadi dasar pemeriksaan peradilan kepada terdakwa sehingga hukum yang nantinya akan diterapkan akan lebih tepat.

Pembuktian pada dakwaan alternatif tidak dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan dakwaan, tetapi memberi pilihan dakwaan mana yang ingin dibuktikan lebih dulu. Pembuktian juga dapat dilakukan dengan memeriksa dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan terhadap keseluruhan dakwaan dipilih salah satu yang terbukti untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Sebagai bentuk dakwaan yang mengecualikan dakwaan lainnya, apabila satu alternatif dakwaan telah berhasil dibuktikan, maka tidak diperlukan pembuktian atas dakwaan yang lain.

Pemilihan bentuk dakwaan alternatif pada kasus ini menurut Penulis adalah tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan karakteristik yang tidak hanya dimiliki oleh Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Perbankan tetapi juga dimiliki oleh Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE. Sedangkan dakwaan ketiga yang menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan bentuk antisipasi Jaksa Penuntut Umum apabila baik ketentuan dari Undang Undang Perbankan dan Undang Undang ITE tidak berhasil dibuktikan pada sidang pengadilan mengingat ketentuan dari kedua undang undang



husus tersebut memiliki banyak unsur yang jika tidak dapat dibuktikan seluruhnya maka akan menggugurkan dakwaan.

Bentuk dakwaan subsidair merupakan bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari tindak pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”. Pada dakwaan ini, dakwaan pertama atau primair menjadi prioritas pertama untuk dibuktikan yang jika tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan dakwaan kedua atau subsidair dan begitu seterusnya. Jika dakwaan primair telah berhasil dibuktikan, maka pemeriksaan tidak dilanjutkan ke dakwaan subsidair dan hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan yang telah terbukti.

Pada dakwaan kedua kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan subsidair dimana pada dakwaan primair jaksa menggunakan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pada dakwaan subsidair menggunakan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE jo. Pasal 52 ayat (3) Undang Undang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada dakwaan subsidair, jaksa menggunakan pasal yang sama dengan dakwaan primair dengan menambahkan Pasal 52 ayat (3) yang memberikan tambahan jumlah ancaman pidana jika tindak pidana pada undang undang ini dilakukan terhadap sistem elektronik serta data elektronik milik pemerintah dan badan strategis lainnya termasuk perbankan.

Penyusunan dakwaan subsidair yang dilakukan jaksa, menurut Penulis merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan pada dakwaan

subsidaire tersebut tidak terdapat perbedaan unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair dengan dakwaan subsidair. Kedua dakwaan tetap menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE hanya pada dakwaan subsidair jaksa menambahkan pasal yang berkonsekuensi pada penambahan ancaman maksimal terhadap terdakwa.

Menurut Penulis, dengan penyusunan dakwaan seperti itu, terhadap kedua dakwaan baik primair maupun subsidair hanya diperlukan sekali pembuktian sehingga tidak perlu dibuat subsidair. Selain itu, jika kita merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, maka seharusnya jaksa menempatkan dakwaan dengan ancaman yang lebih berat pada dakwaan primair dan dakwaan dengan ancaman hukuman yang lebih ringan pada dakwaan subsidair.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat Penulis simpulkan bahwa dalam penyusunan dakwaan yang mengkombinasikan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair jaksa tidak menyusun dakwaan subsidair sesuai dengan ketentuan seharusnya dimana dakwaan dengan ancaman hukuman yang berat seharusnya ditempatkan pada dakwaan primair. Terlepas dari perbuatan jaksa tersebut, Penulis pribadi berpendapat bahwa dakwaan alternatif murni merupakan bentuk dakwaan yang lebih tepat untuk digunakan. Hal ini didasarkan pada dakwaan kedua yang tidak memiliki perbedaan unsur perbuatan atau akibat dari tindak pidana antara pasal yang digunakan dakwaan primair dengan dakwaan subsidair.

Analisis Penulis selanjutnya akan memaparkan mengenai penerapan sanksi pidana dalam putusan yang dijatuhkan pada Kasus Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks. putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus pidana pembobolan dana nasabah yang Penulis teliti berdasarkan pada dakwaan yang telah Penulis uraikan sebelumnya.

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana haruslah didasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa. Selain harus berdasarkan pada dakwaan, penerapan hukum pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa.

Sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak semata-mata menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga faktor-faktor lain diluar hukum. Mengenai pemberatan dan peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana telah diatur secara tegas di Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Terhadap setiap tindak pidana berlaku dasar pemberatan pidana yang dikenal dengan dasar pemberatan pidana umum. Dasar pemberatan pidana umum terdiri atas tiga, yaitu dasar pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan karena

menggunakan bendera kebangsaan, dan dasar pemberatan karena pengulangan.<sup>48</sup> Sedangkan dasar-dasar peringanan yaitu menurut KUHP: belum berumur 16 (enam belas) tahun; menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2011 yang intinya mengubah usia anak dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Alasan peringan lainnya menurut undang-undang yaitu perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.<sup>49</sup>

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks atas nama terdakwa Rudi Guiwan dalam amar putusannya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembobolan dana nasabah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

---

<sup>48</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 73.

<sup>49</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, h. 97, 100, dan 105.

1. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal;
2. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) unit komputer merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keyboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda terima tanggal 20-01-2011;
3. 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank CIMB Niaga;
4. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada Bank CIMB Niaga;
5. Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty;
6. Berita acara serah terima *user id* Rudy Guiwan;
7. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga,
8. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan keluhan a.n. Lily Herawaty
9. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, Semarang untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB Niaga Cab. Makassar;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011.

Menurut putusan di atas, hakim menyatakan terdakwa Rudi Guiwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembobolan dana nasabah”. Putusan hakim yang memilih untuk menjatuhkan pidana berdasarkan

dakwaan pertama yang menggunakan Undang Undang Perbankan menurut Penulis adalah hal yang tepat. Menurut analisis penulis, pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam ruang lingkup perbankan, maka dari itu, Undang Undang Perbankan memiliki kekhususan yang lebih dibandingkan Undang Undang ITE.

Pendapat penulis ini dibenarkan oleh hakim Ketua Majelis yang memeriksa kasus ini, Jamuka Sitorus, dalam wawancara yang Penulis lakukan pada Tanggal 19 Agustus 2014 Pukul 10.23 WITA yang menyatakan bahwa pemilihan dakwaan pertama didasarkan pada asas Kekhususan Sistematis. Menurut Jamuka Sitorus, dalam mengadili suatu kasus, penegak hukum wajib untuk taat kepada asas hukum untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan mencemari proses hukum.

Selain pemilihan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Penulis turut mencermati sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Rudi Guiwan. Pada amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut merupakan pidana minimum (*straf minimum*) dari Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim, termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah Bank CIMB Niaga Cabang Makassar;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menurut Penulis, terdakwa Rudi Guiwan seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana diatas pidana minimal mengingat secara jelas hakim menyebutkan adanya alasan pemberat yaitu perbuatan terdakwa dianggap meresahkan nasabah Bank CIMB Niaga Cabang Makassar. Mengenai alasan pemberat ini, menurut Jamuka Sitorus selaku Ketua Majelis berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan pada tanggal 19 Agustus 2014 Pukul 10.23 WITA, ditetapkan oleh hakim dengan mendasarkan bahwa tindak pidana perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi yang jika terjadi dapat memberi dampak pada ekonomi masyarakat berupa terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Sebagai penyedia jasa keuangan yang berhubungan dengan masyarakat luas, lembaga perbankan telah menjadi salah satu badan yang vital bagi masyarakat. Adanya tindak pidana pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh internal bank akan menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Rendahnya integritas pelaku dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya bisa menjadi bagian pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman terdakwa mengingat pada dasarnya terdakwa melakukan kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pegawai bank.

Sedangkan alasan yang meringankan hukuman terdakwa, menurut hemat Penulis, merupakan alasan sosiologis yang bukan berasal dari ketentuan undang-undang. Selain itu, alasan sosiologis sifatnya hanya pelengkap.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian skripsi di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan sebagai berikut ini:

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Penulis masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yaitu dalam hal penyusunan dakwaan alternatif subsidiarisitas yang dilakukan oleh jaksa. Pada dakwaan kedua yang disusun oleh jaksa secara subsidair menempatkan aturan dengan ancaman hukum yang lebih berat sebagai bagian subsidiair. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum pidana dimana seharusnya aturan dengan ancaman hukum yang lebih berat harus ditempatkan pada dakwaan primair. Selain itu, tidak terdapat unsur yang berbeda dari aturan yang digunakan pada dakwaan primair dengan subsidair sehingga jenis dakwaan yang digunakan cukup alternatif saja.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Guiwan pada perkara Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks menurut Penulis masih telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yaitu dalam hal penyusunan putusan

## ***B. Saran***

1. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, aparat hukum dapat memprioritaskan penggunaan Undang Undang Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang Sistematis.
2. Tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan telah mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya *electronic banking* atau *internet banking*. Maka dari itu, perlu dibuat undang undang tindak pidana khusus perbankan untuk memudahkan penegak hukum dalam menangani tindak pidana perbankan.

## RIWAYAT HIDUP



**ARSIDIN**, Lahir pada tanggal 21 Mei 1992 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara, dari pasangan Bapak Hadi dan Ibu Simbara.

Jenjang pendidikan ditempuh mulai SD 60 Pongka tamat pada tahun 2004, dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP 1 Watampone tamat pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas di SMA 4 Watampone tamat tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum selesai pada tahun 2014.